

**RELOKASI YANG DIMINTA : PELAKSANAAN RELOKASI
DALAM PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN
(Studi Kasus: Masyarakat Dusun Tambaksari dan Dusun Senik Desa Bedono
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**

Oleh:

R

[rrahasia1708@gmail.com](mailto:r rahasia1708@gmail.com)

Pembimbing:

Dr. ,Drs., Teguh Yuwono., M.pol Admin

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kode pos 1269

Telepon : (024) 7465407 Fax : (024) 7465405

ABSTRAKSI

Kebijakan relokasi yang dilaksanakan pada warga di Dusun Tambaksari dan Dusun Senik Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan salah satu kebijakan relokasi yang disebabkan oleh adanya bencana rob yang melanda dua dusun tersebut. Dimana terdapat kelompok warga yang menerima dan menolak kebijakan relokasi tersebut. Tujuan utama dari dilaksanakan kebijakan relokasi tersebut adalah untuk keselamatan warga. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dampak selain keselamatan yang ada pada masyarakat setelah kebijakan relokasi dilaksanakan mulai dari bidang sosial dan budaya, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan. Dimana pelaksanaan yang ada juga dilihat dalam perspektif kewarganegaraan melalui empat dimensinya yakni keanggotaan, legal status, hak, dan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fakta bahwa kebijakan relokasi yang dilaksanakan bersumber dari permintaan masyarakat. Kemudian Pelaksanaan dari relokasi yang dirasakan penerima dan

penolak menunjukan keadaan yang selaras dengan dimensi kewarganegaraan yakni pada dimensi Legal Status, Hak, dan Partisipasi. Sementara itu terdapat satu kondisi pasca relokasi yang berlawanan dengan dimensi kewarganegaraan yakni pada dimensi keanggotaanya.

Kata Kunci: pelaksanaan, relokasi, kewarganegaraan

ABSTRACTION

The relocation policy carried out on residents in Tambaksari Hamlet and Senik Hamlet, Bedono Village, Sayung Subdistrict, Demak Regency was one of the relocation policies caused by the rob disaster that hit the two hamlets. Where there are groups of citizens who accept and reject the relocation policy. The main purpose of implementing the relocation policy is for the safety of citizens. In this study the authors aimed to determine the impact other than safety that existed in the community after the relocation policy was implemented starting from the social and cultural fields, political fields, economic fields, and environmental fields. Where the existing implementation is also seen in the perspective of citizenship through its four dimensions, namely membership, legal status, rights, and participation. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and observations. The results of this study indicate that there is a fact that the relocation policy implemented is based on community demand. Then the implementation of relocation is felt by the recipient and the refusal to address the conditions that are in harmony with the dimensions of citizenship, namely in the dimensions of Legal Status, Rights and Participation. Meanwhile, there is one post-relocation condition that is contrary to the dimension of citizenship, namely in its membership dimension.

Keywords: impact, relocation, citizenship

I. PENDAHULUAN

Demak merupakan salah satu Kabupaten yang letaknya berada di daerah pesisir pantai utara Jawa. Letak geografis yang berada di daerah Pesisir pantai membuat beberapa wilayah dari Kabupaten Demak rentan terhadap ancaman bencana abrasi. Dimana hal tersebut telah terjadi pada salah satu wilayah di Kabupaten Demak yakni di Kecamatan Sayung. Bencana air rob atau abrasi air laut tersebut tepatnya terjadi pada wilayah Desa Bedono yakni di dusun Senik dan Tambaksari. Akibat dari bencana tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan kebijakan relokasi warga dari dua dusun tersebut. Namun, tidak semua mau untuk dilakukan relokasi oleh Pemerintah. Melihat adanya pro dan kontra atas pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut menarik minat penulis untuk melihat dampak yang dirasakan oleh mereka. Pertanyaan peneliti ini akan dikaji dengan menggunakan perspektif kewarganegaraan.

Penelitian ini sendiri setidaknya didasarkan atas empat latarbelakang empiris. Pertama, berdasarkan atas kondisi geografis yang ada di lokasi penelitian. Dimana lokasinya berada di daerah pesisir pantai utara Jawa dan dekat dengan lokasi reklamasi pantai yang ada di wilayah pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Reklamasi pantai di Semarang berdampak pada debit air laut yang seharusnya berada di pantai Semarang beralih menuju wilayah pantai di daerah dusun Senik dan Tambaksari. Hal tersebut diperparah dengan adanya latarbelakang kedua yakni alih fungsi

hutan bakau menjadi areal tambak. Hutan bakau yang seharusnya menjadi vegetasi peredam ombak air laut yang menuju daratan banyak yang sudah hilang. Imbasnya adalah air laut langsung masuk kepermukiman dan merendam kawasan permukiman. Dari hasil keterangan warga puncak dari abrasi air laut yang “menenggelamkan “ permukiman warga terjadi pada akhir tahun 1990an untuk Dusun tambaksari dan awal Tahun 2003 untuk dusun Senik. Kondisi yang kemudian membuat Pemeritah memutuskan melakukan kebijakan relokasi adalah ketika latarbalakang ketiga dan keaempat yakni data kependudukan warga dari dua dusun tersebut terus mengalami penurunan akibat banyak yang pindah. Serta latarbelakang terakhir yakni kondisi lingkungan yang sudah tidak aman dan layak untuk dijadikan pemukiman warga kembali. Dimana sebagian besar wilayah dua dusun tersebut telah terendam air laut mulai akhir tahun 1980an hingga awal 2000an. Atas dasar empiris tersebut kemudian munculah kebijakan relokasi dari Pemeritah kepada warga dari dua Dusun tersebut, namun hasil dari kebijakan tidak semua menerima untuk direlokasi. Dari jumlah total 75 kepala keluarga di dusun Tambaksari 5 diantaranya memutuskan untuk menolak ikut dalam kebijakan relokasi, sementara itu di dusun Senik ada sekitar 200 kk yang menerima relokasi dan 3 menolak. Kondisi aktual yang ada saat ini dari warga penolak relokasi di dusun Tambaksari telah bertambah jumlah kepala keluarga sebanyak 10 kk dan di dusun Senik tinggal menyisakan 1 kk.

Secara teoritik tidak banyak ditemukan penelitian yang serupa dengan apa yang akan penulis teliti ini di Indonesia. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang relevan namun dengan subjek penelitian yang berbeda. sementara itu penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti penulis dilakukan oleh beberapa peneliti diluar Indonesia.¹ Dimana secara garis besar penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis hanya meneliti dampak dari kebijakan pada beberapa bidang saja.² Pada titik ini penulis menemukan celah untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian serupa. Pengembangan yang dilakukan penulis adalah dengan meneliti hampir pada semua bidang yang sebelumnya diteliti secara terpisah pada penelitian – penelitian terdahulu. Adapun bidang yang akan dilakukan penelitian tersebut mulai dari bidang sosial dan budaya, ekonomi, politik, lingkungan, dan psikologi. Selain itu penulis juga melakukan pengemabangan tidak sebatas pada kompleksitas bidang yang akan diteliti, namun penulis juga akan melihat dampak-dampak yang ada pada berbagai bidang tersebut dengan menggunakan perspektif Kewarganegaraan.

¹ Beberapa penelitian tersebut adalah 1. Muspianto Sepriansyah:2014.”dampak relokasi pemukiman penduduk bantaran sungai karang mumus di Kota Samarinda” 2. Yessi Yolanda S:2016 “evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi gunung Sinabung” 3. Li Haming & Philip Ress: 2000, “dampak kebijakan relokasi pemukiman sekitar waduk sungai Yangtze” 4. Louis M. Najarian dkk: 2005, “*The effect of relocation after a natural disaster*” 5. Lori Uchers-pines, “*Health effects of relocation following disaster: a systematic review of the literatur*” dan beberapa penelitian terdahulu yang lain dapat dilihat secara detail dalam naskah asli skripsi yang dibuat oleh penulis.

² Detail dapat dilihat dalam bab I bagian latarbelakang teoritik pada skripsi penulis dengan judul “Dampak Kebijakan relokasi dalam perspektif Kewarganegaraan”.

II. KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini setidaknya berdasarkan atas beberapa kerangka teori, diantaranya adalah teori kebijakan, teori Relokasi dan teori kewarganegaraan. Untuk teori kebijakan sendiri digunakan peneliti sebagai dasar dalam melihat proses pelaksanaan kebijakan relokasi itu sendiri. Pada bagian ini penulis tidak terlalu menjelaskan kebijakan publik secara definitif, melainkan lebih kepada Pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat. Sebagai sebuah *strategi* kebijakan publik tidak saja bersifat *positif*, namun juga *negatif*, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat *menerima salah satu dan menolak yang lain*. Meskipun terdapat ruang bagi *win-win* dan sebuah tuntutan dapat diakomodasi, pada akhirnya ruang bagi *win-win* sangat terbatas sehingga kebijakan publik lebih banyak pada ranah *zero-sum game*, yaitu menerima yang ini dan menolak yang lain³. Ketika dilapangan menunjukan adanya penerimaan dan penolakan atas kebijakan yang telah dibuat tentu hal tersebut wajar karena dalam teorinya menjelaskan demikian.

Sementara itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kewarganegaraan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Dimana empat dimensi dari kewarganegaraan tersebut yang digunakan, pertama dimensi keanggotaan, kedua dimensi legal status, ketiga dimensi hak dan terakhir

³ Diinterpretasiakan dari isi buku karangan Nugroho riant, 2013."publik policy : dinamika kebijakan , analisis kebijakan, manajemen kebijakan". Halaman 97,bab publik policy.Jakarta.: Grasindo

dimensi partisipasi. Empat dimensi tersebut digunakan untuk melakukan analisis terhadap dampak yang muncul pada lima bidang dampak yang akan diteliti yakni, bidang sosial dan budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan.⁴

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tinjauan literatur. Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk pengambilan data sendiri selama 2 minggu, dengan 17 narasumber yang terdiri dari 4 warga penerima relokasi di dusun Tambaksari baru dan 7 orang dari dusun Senik baru. Dari warga penolak relokasi berjumlah 4 orang dari dusun tambaksari 1 orang dari dusun Pandansari 1 orang dari perangkat Desa Bedono. Proses pengambilan data melalui wawancara dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung dan terselubung. Terdapat dua rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pertama mengenai bagaimana proses pelaksanaan kebijakan relokasi terhadap masyarakat Dusun Tambaksari dan Dusun Senik, serta pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana perspektif kewarganegaraan menjelaskan hal tersebut

⁴ Interpretasi dari isi buku karangan Hiariej Eric & stoke kristian.2017. ” *politics of citizenship in Indonesia* ”., hlm:25. Jakarta. Yayasan pustaka obor Indonesia.

III. PEMBAHASAN

Berikut ini akan disajikan pembahasan mengenai beberapa hasil temuan yang ada dilapangan. Dimana pokok bahasan pertama membahas mengenai proses pelaksanaan dari kebijakan relokasi, kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai munculnya dua kelompok pasca relokasi yakni penerima dan penolak relokasi dan pada poin terakhir disajikan temuan pasca pelaksanaan relokasi dalam bidang sosial dan budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan.

3.1. Pelaksanaan Relokasi: Kelompok Penerima dan Penolak

Kondisi lingkungan permukiman penduduk dua dusun tersebut yang sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan sudah tidak dapat dikatakan aman lagi menjadi salah satu faktor pemicu munculnya kebijakan relokasi kepada mereka. permukiman yang hampir setiap hari terkena air rob membuat kondisi yang ada dilingkungan mereka semakin membahayakan untuk keselamatan. Akan tetapi salah satu faktor utama yang membuat mereka akhirnya direlokasi adalah adanya permintaan langsung dari mayoritas masyarakat dua dusun tersebut. Seperti kutipan pernyataan salah satu narasumber berikut ini.

“riyengan banjir rob terus, niku damel proposal ngantos wongsal wangsul kados mboten diurusi. Terus mriki kaku ati masyarakat syarekat rembugan mangke enjang sedoyo gede cilik munggah teng pak camat. Terus dugi mriko matur pak kulo nyuwun

panggenan, nak jenengan paringi kulo geh wangsul nek mboten jenengan paringi kulo mboten wangsul mpun toktel ngiten tok, niku sagete langsung diurus (dulukan banjir rob terus, lalu itu buat proposal hingga bolak-balik seperti tidak diurusi. Terus sini jengkel, masyarakat, syarekat berembug nanti siang semua besar kecil naik ke pak camat. Terus sampai sana bilang pak kita minta tempat tinggal, kalo anda beri kami akan pulang, kalo tidak diberi kami tidak akan pulang, gertak seperti itu, kemudian baru bisa diurus)”⁵

Pada kutipan tersebut setidaknya mampu memberikan gambaran mengenai asal usul kebijakan relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya berasal dari tuntutan masyarakat untuk dipindahkan. Pasca pemerintah memberikan kebijakan relokasi nyatanya tidak semua masyarakat mau untuk direlokasi. Pada kondisi ini kemudian muncul dua kelompok masyarakat baru yakni kelompok penerima dan penolak relokasi yang berasal dari masyarakat Dusun Tambaksari dan Dusun Senik. Mayoritas masyarakat dari kedua dusun tersebut kemudian menjadi kelompok penerima dari kebijakan relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. mereka dipindahkan ke tanah irigasi yang berada di Desa Purwosari untuk kelompok penerima relokasi dari Tambaksari dan ke tanah irigasi Desa Gemulak untuk kelompok penerima dari Dusun Senik. Oleh pemerintah kemudian kelompok mereka disebut sebagai warga

⁵ Hasil wawancara dengan narasumber sakroni (64 tahun) pada tanggal 17/10/2018 sekitar pukul 12:44 wib.

Dusun Tambaksari baru dan Senik baru. sementara itu kelompok penolak relokasi sendiri dengan jumlah anggota jauh lebih sedikit bertahan di dusun lama mereka dengan segala keterbatasan, dimana salah satu alasan terbesar mereka menolak relokasi yakni untuk menjaga keberadaan makam leluhur mereka Kyai Mudzakir yang kini menjadi lokasi wisata religi.

3.2. Temuan Kondisi Pasca Relokasi

Kebijakan relokasi yang dilaksanakan kepada masyarakat dari dua dusun tersebut nyatanya memberikan dampak terhadap kondisi mereka pasca kebijakan relokasi dilaksanakan. Pertama, pada bidang sosial dan budaya temuan yang ada dilapangan menunjukkan adanya perubahan kebudayaan dari kelompok penolak relokasi dalam proses pelaksanaan ibadah sholat Jumat mereka. dimana dalam proses sholat jumat mereka pasca relokasi dilaksanakan dengan jumlah jamaah kurang dari 40 dan pada rakaat terakhir sholat jumat mereka berikan tambahan doa Qunut sebelum sujud. Dari hasil keterangan riwayat sahabat nabi yang bernama Khaul Qodim menjadi acuan mereka dalam melaksanakan proses sholat jumat seperti itu. Dimana pada masa Khaul Qodim pernah melaksanakan Sholat Jumat hanya dengan 3 orang saja.⁶ Selain itu temuan yang lain adalah adanya perubahan data kependudukan mereka dimana masyarakat penerima relokasi berubah data kependudukannya dari warg Desa Bedono menjadi warga Desa Purwosari dan Desa Gemulak. Sementara itu untuk

⁶ Hasil keterangan wawancara dengan narasumber H. Nor Ali pada tanggal 12/10/2018 sekitar pukul 11:01 wib.

kelompok penolak relokasi data kependudukan mereka mengalami perubahan menjadi bagian dari warga Dusun Pandansari yang merupakan dusun terdekat dari mereka. Sedangkan keberadaan Dusun Tambaksari dan Senik secara kependudukan sudah tidak ada lagi hanya saja oleh masyarakat umum masih sering menyebut keberadaan dua dusun tersebut. Ketika kondisi yang ada pada bidang sosial dan budaya tersebut dilihat dengan sudut pandang kewarganegaraan tentu tidak menunjukkan keadaan yang berlawanan dengan nilai-nilai dimensi kewarganegaraan. Secara keanggotaan untuk kelompok penerima relokasi kondisi keanggotaan mereka agaknya sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi keanggotaan yang homogen, terbatas, dan stabil seperti yang menjadi salah satu konsep dari dimensi keanggotaan dalam perspektif kewarganegaraan.⁷ Sementara itu pada kelompok penolak cenderung tidak ada perbedaan dengan konsep dari keanggotaan karena dalam kelompok mereka memang homogen berasal dari warga asli yang cenderung stabil dan terbatas. Dalam sudut pandang kewarganegaraan praktis hal yang paling menonjol adalah berkaitan dengan dimensi keanggotaan tadi.

Selanjutnya pada bidang politik ini temuan kondisi pasca relokasi menunjukkan keadaan partisipasi dari kelompok penerima relokasi yang baik dan partisipasi kelompok penolak relokasi yang cenderung pasif. Partisipasi tersebut dilihat dari ukuran sejauh mana mereka turut serta

⁷ Diinterpretasikan dari isi kutipan dari Hiariej Eric & Kristian Stokke. 2017, "politic of citizenship in Indonesia". Jakarta . Yayasan Pustaka obor, hlm.27.

dalam upaya pembahasan urusan publik seperti musrenbangdes dan jenis musyawarah yang lain. Kondisi mereka ketika dilihat dari dimensi partisipasi kewarganegaraan memunculkan simpulan bahwa kelompok penerima relokasi cenderung sebagai *participant citizens*⁸ hal ini didasarkan atas keaktifan mereka dalam agenda perumusan kebijakan skala desa yang mayoritas selalu mau untuk terlibat dan memberikan usul. Sedangkan kelompok penolak relokasi cenderung pada wujud *non-participant citizens*⁹ yakni wujud partisipasi masyarakat penolak yang hanya sebatas pada menerima atas hasil keputusan yang dibuat dari kesepakatan dalam proses musyawarah untuk menentukan kepentingan publik. Sementara itu dalam hal peran pemerintah kondisi yang ada menunjukkan mayoritas masyarakat yang terwakili oleh para narasumber memiliki anggapan pemerintah telah adil dan berperan terhadap pemenuhan hak mereka sebagai warganegara pasca relokasi dilaksanakan. Dalam perspektif kewarganegaraan dimensi legal status memberikan penjelasan bahwa salah satu konsekuensi dari status masyarakat sebagai warganegara menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini peneliti melihat kewajiban dari pada pemerintah dalam upaya untuk memenuhi hak masyarakat. dan hasil temuan menunjukkan data bahwa anggapan masyarakat pemerintah telah berperan dalam memenuhi hak mereka.

⁸ Merupakan konsep partisipasi yang diungkapkan oleh Janonski dan Gran (2002) yang dikutip dalam buku Hiariej Eric & Kristian Stokke. 2017, "*politic of citizenship in Indonesia*". Jakarta . Yayasan Pustaka obor, hlm.32

⁹ ibid

Berikutnya pada bidang ekonomi temuan pasca relokasi yang paling menonjol adalah adanya peningkatan ekonomi dari masyarakat dan status aset. Pada peningkatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan merujuk pada legal status kewarganegaraan. Pemerintah melaksanakan kewajiban dengan memberikan program industrialisasi dikawasan Kecamatan Sayung yang kemudian menjadi salah satu sektor pembuka lowongan kerja termasuk untuk para kelompok penerima dan penolak relokasi. hanya saja pada sektor ini mayoritas penikmatnya berasal dari kelompok penolak. Industrialisasi menjadi salah satu tumpuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka pasca relokasi yang banyak dari mereka menganggur. Kemudian munculnya potensi wisata religi dengan keberadaan dari makam Kyai Mudzakir menjadi salah satu sektor utama bagi kelompok penolak relokasi dalam meningkatkan pendapatan mereka pasca relokasi. pemerintah dalam hal ini desa membentuk Bumdes (badan usaha milik desa) yang bergerak pada bidang pengembangan sarana prasarana wisata religi yang ada di Dusun Tambaksari. Pasca relokasi mayoritas kelompok penolak relokasi membuka warung dimasing-masing rumah mereka sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan mereka. berikutnya mengenai status aset dalam hal ini tanah baik dari kelompok penolak maupun penerima, pasca relokasi tanah mereka yang sudah terendam oleh air laut dibeli oleh pihak swasta. Dimana dari hasil keterangan pihak tersebut berasal dari Negara Korea dengan nominal harga tanah

permeternya berkisar Rp.2000,-Rp.3.000,-. Tentu untuk ukuran harga tanah adalah sangat murah, akan tetapi oleh beberapa narasumber disebutkan bahwa lebih baik dijual mumpung ada yang mau untuk membeli.

“nikunla ngoten pak, sebagian eten seng teseh enten seng didol, sebab ketingal mung banyu kabeh, La saiki elek-elek orao kok ono sengngarepke , raketang sitiko kok ono seng arep nuku. La nyatane akeh seng di dol (itukan gini pak, sebagian ada yang masih ada juga yang dijual, sebab kelihatan hanya air semua, sekarang jelek-jelekpun masih ada yang mau beli, nyatanya kemudian banyak yang dijual.)”¹⁰

Kondisi ekonomi masyarakat yang peneliti paparkan diatas merupakan kondisi pasca relokasi dalam jangka panjang. Jika melihat dalam jangka pendek kondisi ekonomi pasca relokasi berada pada kondisi yang sulit. Merujuk pada salah satu konsep dari perspektif kewarganegaraan berikut ini.

“economic injustices, on the one hand, are rooted in political-economic structures and involve exploitation, marginalisation, and deprivation along class divisions.”¹¹

Salah satu poin inti dari kutipan tersebut adalah bagaimana ketidakadilan ekonomi bersumber dari struktur politik dan ekonomi. Dimana dalam

¹⁰ Hasil wawancara dengan narasumber Surkhan (78 tahun) pada tanggal 16/10/2018 sekitar pukul 10:30 wib

¹¹ Fraser 1995; Fraser dan Olson 2008, dikutip dari buku karangan Hiariej Eric & Kristian Stokke. 2017, *“politic of citizenship in Indonesia”*. Jakarta . Yayasan Pustaka Obor, hlm.40.

konteks masyarakat relokasi jelas menunjukkan adanya penurunan kondisi ekonomi hampir mulai dari segi pendapatan dan peluang kerja. Kondisi yang ada tersebut merupakan buah hasil dari keputusan struktural politik pemerintahan, sebagai wujud langkah responsip atas kondisi masyarakatnya yang membutuhkan bantuan keamanan , kemudian pemerintah secara struktural mengeluarkan kebijakan relokasi. Dilihat dari sisi ini jelas menggambarkan bagaimana adanya korelasi diantara konsep dengan realitas yang ada dilapangan. Kendati kemudian kondisi ini tidak secara rigit berada pada kondisi yang tidak berubah, karena dalam masa kemasa terlihat adanya peningkatan sektor ekonomi masyarakat relokasi

Bidang yang terakhir adalah lingkungan pada bidang ini temuan pasca relokasi yang paling menonjol adalah adanya peningkatan kepedulian dari masyarakat penolak relokasi terhadap lingkungan. Sementara itu untuk kelompok penerima relokasi sendiri cenderung kurang peduli terhadap kondisi lingkungan yang ada disekitar mereka. meskipun kondisi lingkungan yang ada disekitar permukiman penerima relokasi saat ini sudah lagi sama dengan keadaan saat awal mereka pindah yang penuh dengan hamparan sawah hijau dan kini sudah menjadi tambak dan sering terkena rob. Kondisi tersebut tidak menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka untuk setidaknya lebih peduli terhaddap lingkungan. Dalam kondisi ini jika dikaitkan dengan wujud partisipaasi masyarakat dalam urusan publik maka akan memunculakn keterbalik dengan apa yang ada pada bidang politik. Jika pada bidang politik

kelompok penerima relokasi merupakan wujud *participant citizens* maka pada bidang ini berganti menjadi *non-participant citizens* dengan kelompok penolak relokasi. pernyataan ini tentu didasarkan peneliti atas kondisi yang ada di kelompok penolak relokasi yang secara partisipasi mereka dalam upaya melindungi lingkungan dapat dikatakan baik. Salah satu contoh nyata adalah Ibu Pasijah yang merupakan bagian dari kelompok penolak. Dimana beliau begitu konsens terhadap perlindungan hutan bakau (mangrove) yang ada di Desa Bedono secara umum dan Dusun Senik secara khusus. Bahkan beliau pernah mendapat penghargaan atas dedikasi yang tinggi terhadap lingkungan dan dinudang ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Dibalik kepedulian lingkungan kelompok penolak ada aktor bernama OSK yang merupakan organisasi lingkungan yang banyak membantu terhadap rekonstruksi lingkungan hijau yang ada di Desa Bedono.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berikut ini merupakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama kebijakan relokasi yang dilaksanakan kepada masyarakat Dusun Tambaksari dan Dusun Senik merupakan kebijakan yang bermula dari permintaan masyarakat sendiri yang menginginkan untuk dipindah relokasi yang lebih aman. Kedua

kondisi pasca relokasi yang dilihat dari empat bidang mulai dari bidang sosial dan budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan ketika ditinjau dalam perspektif kewarganegaraan menunjukan kondisi yang mayoritas selaras dengan nilai-nilai dari dimensi kewarganegaraan. Hanya pada satu kondisi saja yang ditemukan peneliti kurang sesuai yakni pada keanggotaan kelompok penerima relokasi.

4.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah berkenaan dengan proses pembuatan kebijakan dari pemerintah yang harus lebih tersusun secara struktural dalam menentukan tujuan atau dampak yang hendak dicapai dalam proses pembuatan kebijakan. Perlu kematangan dalam memutuskan suatu pelaksanaan kebijakan dengan tidak hanya berfokus pada tujuan utama saja, namun juga harus memperhatikan tujuan atau dampak sampingan dari dilaksanakan kebijakan tersebut. Dengan telah dilakukannya penentuan mengenai potensi dampak sampingan dari kebijakan yang akan dibuat tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan munculnya dampak sampingan yang dapat memunculkan permasalahan yang baru.

Daftar Pustaka

- Hiariej Eric & stoke kristian.2017.” *politics of citizenship in Indonesia*”, hlm:25.
Jakarta. Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Nugroho riant, 2013.”publik policy : dinamika kebijakan , analisis kebijakan, manajemen kebijakan”. Halaman 97,bab publik policy.Jakarta.: Grasindo.
- Muspianto Sepriansyah:2014.”dampak relokasi pemukiman penduduk bantaran sungai karang mumus di Kota Samarinda”
- Yessi Yolanda S:2016 “evaluasi kebijakan relokasi pengungsi erupsi gunung Sinabung”
- Li Haming & Philip Ress: 2000, “dampak kebijakan relokasi pemukiman sekitar waduk sungai Yangtze”
- Louis M. Najarian dkk: 2005, “*The effect of relocation after a natural disaster*”
- Lori Uchers-pines, “*Health effects of relocation following disaster: a systematic review of the literatur*”
- Trasnkrrip wawancara narasumber penelitian.